

# Pengaruh Upah Minimum Provinsi, PDRB, IPM, Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Sumatra

Nissya Kaniaputri Jayadiwinata <sup>1\*</sup>, Ruth Eviana Hutabarat <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Jl. Ketintang No.2, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.

Email: [nissya.22170@mhs.unesa.ac.id](mailto:nissya.22170@mhs.unesa.ac.id) <sup>1\*</sup>, [ruthhutabarat@unesa.ac.id](mailto:ruthhutabarat@unesa.ac.id) <sup>2</sup>

## Histori Artikel:

*Dikirim 7 November 2025; Diterima dalam bentuk revisi 20 November 2025; Diterima 15 Januari 2026; Diterbitkan 1 Februari 2026.* Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) – Lembaga KITA.

## Suggested citation:

Jayadiwinata, N. K., & Hutabarat, R. E. (2026). Pengaruh Upah Minimum Provinsi, PDRB, IPM, Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Sumatra. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 12(1), 550-563. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v12i1.5853>.

## Abstrak

Perkembangan ekonomi Indonesia merupakan proses yang kompleks dengan mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat, produktivitas, serta perluasan lapangan kerja. Namun, kesenjangan antarwilayah masih terlihat jelas, terutama di beberapa provinsi yang ada di pulau Sumatra. Adanya fenomena kenaikan upah minimum tanpa peningkatan penyerapan tenaga kerja (high wage low employment growth) dan pertumbuhan ekonomi tanpa penciptaan lapangan kerja (jobless growth) sehingga terjadi ketidakseimbangan antara peningkatan ekonomi dan serapan tenaga kerja yang membuat laju penurunan tingkat pengangguran melambat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh UMP, PDRB, IPM, dan tingkat pengangguran terhadap penyerapan tenaga kerja di sepuluh provinsi di Sumatra selama tahun 2020–2024. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dianalisis menggunakan regresi data panel dengan metode Fixed Effect Model (FEM). Hasil analisis memperlihatkan bahwa UMP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan PDRB, IPM, dan tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatra pada tahun 2020–2024.

**Kata Kunci:** Penyerapan Tenaga Kerja; UMP; PDRB; IPM; Tingkat Pengangguran.

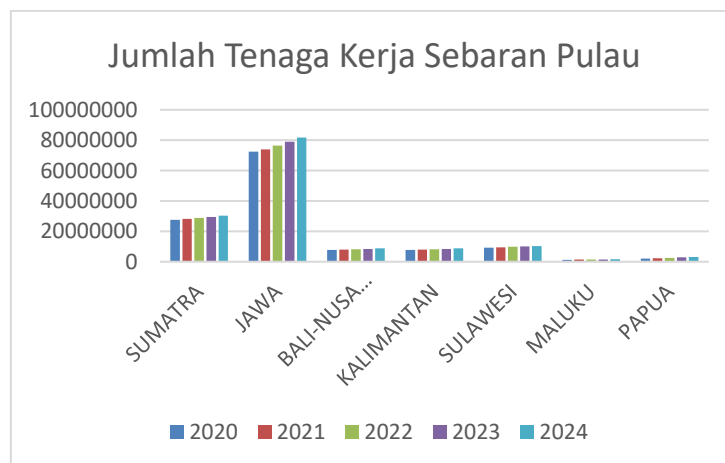
## Abstract

Indonesia's economic development is a complex process that includes improving people's welfare, productivity and expanding employment opportunities. However, regional disparities are still evident, especially in several provinces on the island of Sumatra. There is a phenomenon of minimum wage increases without an increase in labor absorption (high wage low employment growth) and economic growth without job creation (jobless growth), resulting in an imbalance between economic growth and labor absorption, which slows down the rate of decline in the unemployment rate. This study aims to analyze the effect of UMP, PDRB, IPM, and unemployment rate on labor absorption in ten provinces in Sumatra during 2020–2024. The data was obtained from Badan Pusat Statistik (BPS) and analyzed using panel data regression with the Fixed Effect Model (FEM) method. The results of the analysis show that the UMP has a negative and significant effect on labor absorption, while the GRDP, HDI, and unemployment rate have a positive and significant effect on labor absorption in Sumatra in 2020–2024.

**Keyword:** Employment Absorption; Minimum Wage; Gross Regional Domestic Product; Human Development Index; Unemployment Rate.

## 1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi merupakan proses yang melibatkan berbagai perubahan struktural yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketimpangan, dan memperluas kesempatan ekonomi. Proses ini mencakup peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar, perbaikan standar hidup, serta pemberian peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang lebih luas (Todaro, 2011). Di Indonesia, yang terbagi dalam berbagai provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah yang lebih kecil, pembangunan nasional dan daerah sangat bergantung pada interaksi dan sinergi antara keduanya (Indradewa, 2015). Oleh karena itu, pengembangan ekonomi regional yang melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata (Kartikawati *et al.*, 2019). Selain itu, tantangan ketenagakerjaan tidak hanya berasal dari ketersediaan pekerjaan, tetapi juga dari faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja, termasuk permintaan yang terbatas akibat perubahan ekonomi jangka panjang (Susilowati & Wahyuni, 2019). Pembangunan di negara berkembang, termasuk Indonesia, masih dipengaruhi oleh dualisme ekonomi yang mengarah pada ketimpangan antarwilayah. Kesenjangan ini terlihat jelas antara kota dan desa, antara Pulau Sumatra dan wilayah lainnya, serta antara kawasan Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Masing-masing wilayah berusaha mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, yang umumnya diukur melalui pendapatan per kapita. Dengan demikian, berbagai kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat pendapatan nasional dan produktivitas, dengan harapan dapat mengurangi kesenjangan dan menciptakan pemerataan kesejahteraan di seluruh daerah (Ilmiyah, 2017 dalam Saputri & Budi, 2018). Pulau Sumatra, sebagai penyumbang terbesar kedua terhadap ekonomi Indonesia setelah Jawa, memiliki potensi besar yang seharusnya dapat mendorong perkembangan ekonomi yang lebih merata. Selain kekayaan sumber daya alamnya, seperti hasil tambang dan perkebunan, Sumatra juga memiliki posisi geografis yang strategis karena terhubung langsung dengan jalur perdagangan internasional di Selat Malaka. Potensi ini memberikan peluang yang signifikan untuk mendorong aktivitas ekonomi yang dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja produktif bagi masyarakat setempat. Namun, untuk mewujudkan potensi tersebut, diperlukan kebijakan yang tepat yang dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada dan memperkuat infrastruktur ekonomi daerah.



Gambar 1. Grafik Jumlah Tenaga Kerja Sebaran Pulau

Pulau Sumatra, sebagai kawasan ekonomi strategis kedua setelah Jawa, menunjukkan dinamika ketenagakerjaan yang menarik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020–2024, terdapat ketimpangan signifikan antara Jawa dan pulau-pulau lainnya. Pada 2020, jumlah tenaga kerja di Jawa tercatat 72,5 juta orang, sementara di Sumatra hanya 27,6 juta orang. Kesenjangan ini semakin melebar, dengan Jawa mencatatkan 81,2 juta tenaga kerja pada 2024, sementara Sumatra hanya mencapai 30,3

## RESEARCH ARTICLE

juta, yang berarti terdapat selisih 51,3 juta orang atau 1,7 kali lipat lebih banyak di Jawa. Provinsi Sumatra Utara memiliki jumlah tenaga kerja terbesar, dengan peningkatan dari 6,8 juta orang pada 2020 menjadi lebih dari 7,7 juta orang pada 2024. Sebaliknya, Kepulauan Bangka Belitung tercatat sebagai provinsi dengan jumlah tenaga kerja terendah, yaitu sekitar 699 ribu orang pada 2020, yang hanya meningkat sedikit menjadi 766 ribu orang pada 2024. Meski Sumatra berada di posisi kedua dalam hal jumlah tenaga kerja, kesenjangan yang ada dengan Jawa sangat besar. Selain itu, terdapat perbedaan signifikan dalam kapasitas penyerapan tenaga kerja antarprovinsi, dengan provinsi besar seperti Sumatra Utara yang mendominasi, sementara provinsi kecil seperti Bangka Belitung jauh tertinggal. Penyerapan tenaga kerja merujuk pada jumlah pekerja yang dipekerjakan dalam suatu unit bisnis atau sektor tertentu. Penyerapan ini mencerminkan keseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja dalam perekonomian (Prawoto, 2018). *Upah Minimum Provinsi* (UMP) di Pulau Sumatra secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2020, rata-rata UMP tercatat sebesar Rp2,75 juta, dan diperkirakan naik menjadi sekitar Rp3,11 juta pada 2024. Provinsi dengan UMP tertinggi adalah Bangka Belitung, yang mencapai Rp3,64 juta pada 2024, sedangkan provinsi dengan UMP terendah adalah Bengkulu, yang hanya mencatatkan Rp2,50 juta. Fenomena "high wage low employment growth", di mana kenaikan upah minimum tidak selalu diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja, terjadi di provinsi-provinsi seperti Bangka Belitung, Lampung, dan Kepulauan Riau, yang justru menunjukkan angka pengangguran yang lebih tinggi. Kesenjangan UMP antarprovinsi ini mencerminkan perbedaan dalam struktur dan produktivitas regional yang mempengaruhi distribusi tenaga kerja dan daya saing antarwilayah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator utama dalam mengukur aktivitas ekonomi suatu wilayah (Pangastuti, 2015). Data PDRB yang dirilis oleh BPS menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara Jawa dan Sumatra. Pada 2020, PDRB Jawa tercatat sebesar 6,36 juta miliar rupiah, sementara Sumatra hanya mencapai 2,30 juta miliar rupiah, dengan selisih lebih dari 4 juta miliar rupiah. Selisih ini semakin melebar, dengan PDRB Jawa diperkirakan mencapai 7,65 juta miliar rupiah pada 2024, sementara Sumatra hanya 2,71 juta miliar rupiah. Meskipun seluruh provinsi di Pulau Sumatra mengalami tren peningkatan PDRB yang konsisten selama periode 2020–2024, provinsi-provinsi seperti Bengkulu dan Bangka Belitung masih memberikan kontribusi yang kecil terhadap total PDRB Sumatra, dengan angka sekitar 50–60 ribu miliar rupiah pada 2024. Fenomena "jobless growth", di mana pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja, juga terlihat di provinsi-provinsi tersebut, menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi belum sepenuhnya menciptakan lapangan kerja yang cukup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di sejumlah provinsi Pulau Sumatra mengalami tren peningkatan yang stabil dari 71,83 pada 2020 menjadi 73,96 pada 2024, mencerminkan kemajuan dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, capaian IPM antarprovinsi masih belum merata. Pada 2024, Sumatra Utara tercatat sebagai provinsi dengan IPM terendah, yaitu sekitar 71,08, sementara Bengkulu mencatatkan IPM tertinggi dengan skor mendekati 77,99. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan kualitas sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi produktivitas dan penyerapan tenaga kerja di sejumlah provinsi Pulau Sumatra. Tingkat pengangguran di Sumatra menunjukkan tren perbaikan sepanjang 2020–2024, seiring dengan pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Provinsi Sumatra Utara mencatatkan jumlah pengangguran tertinggi, yaitu sekitar 507 ribu orang pada 2020, yang kemudian menurun menjadi 457 ribu orang pada 2024. Sebaliknya, Kepulauan Bangka Belitung mencatatkan tingkat pengangguran terendah, dengan angka yang turun dari 38 ribu menjadi 35 ribu orang pada 2023. Namun, pada 2024, tingkat pengangguran di Kepulauan Bangka Belitung meningkat menjadi 37 ribu orang. Meskipun angka pengangguran secara keseluruhan menurun, kesenjangan antarprovinsi dalam hal pengangguran masih cukup besar. Penurunan tingkat pengangguran yang tidak merata ini dipengaruhi oleh perbedaan struktur ekonomi antarprovinsi. Provinsi dengan basis sektor padat karya, seperti pertanian dan perdagangan, cenderung mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja, sementara provinsi dengan dominasi sektor padat modal menghadapi kesulitan dalam menciptakan lapangan kerja baru karena adanya keterbatasan dalam penciptaan lapangan kerja atau tingginya tingkat otomatisasi. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang bervariasi terkait dampak *upah minimum*, *PDRB*, *pengangguran*, dan *IPM* terhadap penyerapan tenaga kerja.

Studi Prayogo dan Hasmarini (2022) di Yogyakarta menemukan dampak positif yang signifikan, sementara Irfan dan Faridatussalam (2023) di Kabupaten Pati menemukan dampak negatif yang signifikan terkait dengan *upah minimum*. Di sisi lain, penelitian Widyapangesti (2022) di Jawa tidak menemukan dampak yang signifikan. Temuan ini sejalan dengan studi internasional oleh Dixon (2024) di Australia dan Paun *et al.* (2021) di Uni Eropa, yang menunjukkan bahwa pengaruh kebijakan *upah minimum* terhadap kesempatan kerja bergantung pada kondisi pasar tenaga kerja dan tingkat produktivitas masing-masing wilayah. *PDRB* menunjukkan tren yang serupa. Meskipun penelitian Putri *et al.* (2022) di Jawa Tengah tidak menemukan efek yang signifikan, dan Aji dan Ariani (2024) di 10 provinsi Pulau Sumatra menemukan efek negatif yang signifikan, penelitian Maryati *et al.* (2021) di Sumatra Barat menunjukkan bahwa *PDRB* berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Fenomena "jobless growth" juga dijelaskan oleh Haider *et al.* (2023), yang menemukan bahwa elastisitas tenaga kerja terhadap *PDB* di negara berkembang hanya sekitar 0,11–0,15, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. Variabel *IPM* menunjukkan hasil yang beragam. Maryati *et al.* (2021) menemukan bahwa *IPM* berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan Putri *et al.* (2022) tidak menemukan pengaruh signifikan. Studi Azam *et al.* (2023) mengungkapkan bahwa pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja berpengaruh signifikan terhadap *IPM*, sementara kemiskinan dan ketergantungan pada energi fosil dapat menurunkan *IPM*. Hasil ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi bukan satu-satunya penentu kualitas pembangunan manusia, tetapi juga kemampuan negara dalam menyediakan lapangan kerja yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat.

Penelitian tentang pengaruh tingkat *pengangguran* terhadap penyerapan tenaga kerja juga menunjukkan hasil yang bervariasi. Utomo (2022) menemukan bahwa *pengangguran* berdampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa, sedangkan Putriy dan Nurhayati (2024) di Karesidenan Pekalongan menunjukkan hubungan positif yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan antara *pengangguran* dan penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh struktur ekonomi, peran sektor informal, dan efisiensi pasar tenaga kerja di setiap wilayah. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada wilayah Jawa atau tingkat nasional, sementara kajian mengenai Pulau Sumatra masih terbatas. Padahal, Sumatra merupakan penyumbang *PDRB* terbesar kedua di Indonesia dan memiliki dinamika ketenagakerjaan yang berbeda dengan wilayah lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan empiris dan memberikan kontribusi baru dengan mengkaji pengaruh *Upah Minimum Provinsi* (UMP), *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB), *Indeks Pembangunan Manusia* (IPM), dan tingkat *pengangguran* terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatra selama periode 2020–2024. Penelitian ini juga sejalan dengan arah kebijakan *RPJMN 2020–2024* yang menekankan pentingnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pasar tenaga kerja. Fokus pada penciptaan lapangan kerja sebagai prioritas utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menjadi dasar bagi penelitian ini, yang akan menggunakan analisis panel untuk menganalisis interaksi antar variabel makroekonomi tersebut di Pulau Sumatra.

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1 Teori Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut Keynes (1936) dalam "The General Theory of Employment, Interest, and Money" teori Keynesian menyatakan tingkat penyerapan tenaga kerja (employment) dipengaruhi oleh permintaan efektif (*effective demand*) yang ditentukan dari besar kecilnya permintaan pada barang serta jasa yang dihasilkan dalam perekonomian. Ada dua komponen utama permintaan efektif, yang dijabarkan dalam bentuk fungsi berikut:

$$[ N = f(D_1 + D_2) ]$$

$N$  merupakan jumlah tenaga kerja terserap dalam perekonomian,  $D_1$  adalah permintaan konsumsi dan  $D_2$  adalah investasi. Kemudian  $f$  menunjukkan sebagai hubungan fungsional yang menunjukkan bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja bergantung pada besaran permintaan efektif. Rumus ini menjelaskan, ketika total permintaan terhadap barang serta jasa meningkat maka kesempatan bekerja juga akan mengalami peningkatan. Keynes menegaskan bahwa keseimbangan tenaga kerja bisa terjadi apabila perusahaan tidak memiliki dorongan lagi untuk menambah atau mengurangi produksi dikarenakan pendapatan yang diterima sudah seimbang dengan biaya produksi.

## 2.2 Teori Keynesian: Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Pemerintah menetapkan kebijakan upah nominal sebagai upah minimum yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan pekerja pada tingkat tertentu. Dalam teori Keynesian, dijelaskan bahwa naik atau turunnya besaran upah nominal atau upah riil tidak menjadi penentu tingkat penyerapan tenaga kerja. Ketika perubahan harga barang dan jasa cenderung dalam proporsi yang hampir sama, maka daya beli riil masyarakat pun tidak banyak berubah. Sehingga, upah minimum akan memberi dampak padapenyerapan tenaga kerja ketika adanya perubahan perilaku konsumsi dan investasi masyarakat yang dapat mempengaruhi permintaan efektif dan output total dalam perekonomian. Menurut Keynes, upah minimum dan penyerapan tenaga kerja mempunyai hubungan tidak langsung dan kondisional. Ini dikarenakan, saat upah minimum meningkat dan pekerja yang berpendapatan rendah memperoleh tambahan untuk daya beli, maka konsumsi agregat akan meningkat. Permintaan barang dan jasa akan bertambah seiring meningkatnya konsumsi yang kemudian akan memacu perusahaan untuk menaikkan produksi sehingga bisa meningkatkan penyerapan tenaga kerjanya. Namun, ketika kenaikan upah minimum terlalu tinggi, yang kemudian dapat menekan keuntungan serta investasi yang mana investasi adalah salah satu komponen dari permintaan efektif, hal ini akan membuat efek negatif terhadap penyerapan tenaga kerja karena permintaan efektif melemah. Sehingga, besaran upah bukanlah strategi utama untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, melainkan melalui kebijakan yang dapat memperkuat daya beli dan investasi produktif untuk meningkatkan permintaan agregat.

Sejumlah studi terdahulu telah meninjau hubungan diantara upah minimum dan penyerapan tenaga kerja. Penelitian Utomo (2022), yang berjudul *"Faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa selama tahun 2010–2019"* menemukan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hasil ini memperlihatkan bahwa kenaikan upah tanpa peningkatan produktivitas cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan efisiensi biaya dengan mengurangi jumlah pekerja, sehingga kebijakan upah yang terlalu tinggi justru menekan pasar tenaga kerja di sejumlah sektor padat karya yang sensitif pada perubahan biaya produksi. Sebaliknya, penelitian Prayogo dan Hasmarini (2022) yang menganalisis *"Pengaruh IPM, upah minimum, PDRB, dan jumlah penduduk terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018–2021"* menunjukkan hasil berbeda. Studi tersebut menemukan bahwa upah minimum justru berpengaruh positif serta signifikan pada penyerapan tenaga kerjanya. Hal itu menandakan bahwa kenaikan upah bisa menambah daya beli masyarakat dan permintaan produksi yang bisa mendorong peningkatan tenaga kerja. Perbedaan hasil kedua penelitian tersebut menggambarkan bahwa pengaruh kebijakan upah minimum bersifat kontekstual dan berbeda antarwilayah. Faktor seperti tingkat industrialisasi, struktur ekonomi, dan elastisitas tenaga kerja sangat memengaruhi bagaimana kebijakan upah dapat berdampak terhadap pasar tenaga kerja. Berdasarkan perbedaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kembali pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatra tahun 2020–2024, dengan menggunakan teori keynesian yang mengatakan peningkatan upah dapat meningkatkan permintaan efektif melalui konsumsi agregat sehingga mendorong kenaikan output dan memengaruhi penyerapan tenaga kerjanya di pulau Sumatra yang tinggi akan sektor padat karya.



### 2.3 Teori Keynesian: Produk Domestik Bruto Regional (PDRB ADHK) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

PDRB merupakan total nilai produk dan jasa yang diperoleh dari keseluruhan sektor ekonomi di sebuah wilayah pada tahun tertentu. PDRB dilihat sebagai ukuran penting pada aktivitas perekonomian dalam menciptakan produksi dan pendapatan, yang akhirnya akan menghasilkan penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi. Menurut Keynes, produksi akan meningkat, jika terdapat peningkatan permintaan efektif pada barang dan jasa. Sehingga besaran output atau pendapatan agregat dapat mencerminkan hasil produksi dan juga memperlihatkan tingkat permintaan terhadap tenaga kerja. Sejalan dengan pandangan tersebut, Wasilaputri (2016) menyatakan bahwa peningkatan PDRB dapat mendorong kenaikan jumlah pekerja karena tingginya aktivitas ekonomi meningkatkan penjualan dan produksi di berbagai sektor usaha, yang kemudian memunculkan kebutuhan akan tambahan tenaga kerjanya. Hubungan PDRB dengan penyerapan tenaga kerja berefek positif dan saling memperkuat. Apabila PDRB menunjukkan peningkatan, maka ada pertumbuhan perekonomian yang pesat karena permintaan efektif yang meningkat. Hal ini pun dapat mendorong kenaikan produksi dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Begitupula sebaliknya, apabila PDRB menurun, maka daya beli masyarakat dan produksi ikut menurun, sehingga perusahaan akan memangkas kebutuhan tenaga kerja. Dengan demikian, Keynes mengatakan bahwa stimulus fiskal, peningkatan daya beli masyarakat dan investasi publik dapat menjadi opsi kebijakan yang mampu mendukung perkembangan PDRB dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja di suatu wilayah.

Sejumlah penelitian telah mencari hubungan antara PDRB dan penyerapan tenaga kerja. Diantaranya penelitian Irfan & Faridatussalam (2023) yang meneliti "*Determinan Penyerapan Tenaga Kerja di Karesidenan Pati Tahun 2017–2021*". Hasil studi tersebut memperlihatkan bahwa PDRB berpengaruh negatif serta signifikan pada penyerapan tenaga kerjanya, yang berarti pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut tidak diikuti oleh peningkatan jumlah lapangan kerja. Kondisi ini dikarenakan dominasi sektor industri yang semakin bergeser menuju mekanisasi, sehingga kemajuan teknologi dan efisiensi produksi meningkatkan produktivitas namun semakin mengurangi peluang kerja baru dan menciptakan fenomena *jobless growth* atau pertumbuhan tanpa penciptaan lapangan kerja yang memadai. Selain itu, penelitian Chomariah dan Sri S (2023) yang berjudul "*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Industri Besar dan Menengah di Kabupaten Gresik*" mengemukakan bahwa PDRB berpengaruh positif serta signifikan pada penyerapan tenaga kerjanya, karena kemajuan ekonomi daerah mendorong perkembangan industri dan peningkatan kapasitas produksi yang menciptakan lebih banyak penciptaan lapangan kerja baru. Perbedaan hasil penelitian di berbagai wilayah memperlihatkan bahwa pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja sangatlah bergantung pada struktur perekonomian regional. Di daerah yang didominasi oleh sektor padat modal dan mengalami modernisasi, pertumbuhan PDRB dapat diiringi penurunan penyerapan tenaga kerja yang dikarenakan efisiensi produk meningkat. Sebaliknya, di wilayah dengan sektor padat karya, pertumbuhan ekonomi justru memiliki potensi yang kuat terhadap penciptaan lapangan kerja baru. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji kembali pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatra tahun 2020–2024 dengan mengacu pada teori keynesian yang mengatakan peningkatan PDRB diiringi dengan pengusaha yang akan mendorong kapasitas produksi dan menaikkan tenaga kerja untuk memenuhi permintaan yang meningkat.

### 2.4 Teori Keynesian: Tingkat Pengangguran Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Tingkat pengangguran bisa memperlihatkan kondisi ketika pasar tenaga kerja mengalami kegagalan dalam penyerapan tenaga kerja yang menjadikan sebagian tenaga kerja tidak terserap karena kurangnya permintaan efektif dalam perekonomian suatu wilayah. Keynes mengatakan bahwa pengangguran terjadi bukan karena upah yang terlalu tinggi dan akan tetap ada meskipun tenaga kerja diberi upah minimum melainkan pengusaha hanya akan menambah tenaga kerja apabila ada peningkatan dalam permintaan barang dan jasa. Pengangguran menurut keynes bersifat *involunter* (tidak sengaja) yang timbul dikarenakan permintaan agregat (konsumsi dan investasi) tidak mampu meningkatkan produksi sehingga melemahkan penyerapan tenaga kerjanya. Keynes menjelaskan hubungan tingkat pengangguran terhadap penyerapan tenaga kerja bersifat negatif dan saling berkaitan. Ketika permintaan konsumsi dan

## RESEARCH ARTICLE

investasi meningkat, pengusaha akan menambah kapasitas tenaga kerja sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran. Sebaliknya, ketika permintaan efektif melemah, pengusaha akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang akhirnya akan meningkatkan tingkat pengangguran. Sehingga kebijakan yang efektif untuk menurunkan tingkat pengangguran adalah kebijakan yang bisa meningkatkan konsumsi masyarakat dan mendorong investasi seperti kebijakan belanja pemerintah dan program pembangunan infrastruktur untuk mendorong penciptaan lapangan kerja baru. Penelitian Putri dan Nurhayati (2024) mendukung pandangan ini. Studi mereka mengenai “*Analisis Faktor-Faktor Penyerapan Tenaga Kerja di Karesidenan Pekalongan Tahun 2017–2022*” mengemukakan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif serta signifikan pada penyerapan tenaga kerjanya. Artinya, peningkatan jumlah pengangguran justru diikuti oleh peningkatan serapan kerja, karena tekanan pasar tenaga kerja mendorong pemerintah dan pelaku ekonomi untuk memperluas kegiatan produksi dan meningkatkan kesempatan kerja. Kondisi ini memperlihatkan bahwa dalam jangka pendek, kenaikan pengangguran dapat memicu pengambilan kebijakan dan stimulus ekonomi yang memperbesar kesempatan kerja. Sebaliknya, hasil berbeda ditemukan oleh Utomo (2022) tentang “*The Factors of Affecting Labor Absorption in Java Island*”, bahwa pengangguran berpengaruh negatif serta signifikan pada penyerapan tenaga kerjanya. Meningkatnya tingkat pengangguran akan menurunkan jumlah tenaga kerjanya. Hal ini menunjukkan bahwa menurunnya permintaan efektif dan aktivitas ekonomi daerah dapat meningkatkan jumlah pengangguran sehingga penyerapan tenaga kerja pada sektor produksi akan menurun. Perbedaan hasil kedua studi tersebut memperlihatkan bahwa pengaruh tingkat pengangguran terhadap penyerapan tenaga kerja berbeda-beda yang ditentukan oleh kondisi ekonomi dan karakteristik masing-masing wilayah. Penelitian ini berupaya menguji kembali hubungan diantara tingkat pengangguran dan penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatra tahun 2020–2024 dengan berlandaskan pada teori keynesian yang menyampaikan bahwa permintaan agregat meningkat melalui konsumsi dan investasi dapat mengembangkan kegiatan produksi dan mewujudkan lapangan kerja baru sehingga mengurangi pengangguran dan meningkatkan penyerapan tenaga kerjanya.

## 2.5 Teori Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut Gary S. Becker (1993) pada bukunya “*Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education*” Teori Modal Manusia (Human Capital Theory) menekankan bahwa pendidikan, pelatihan, serta kesehatan merupakan bentuk investasi yang dapat menaikkan kualitas sumber daya manusianya. Seseorang yang mempunyai pendidikan serta keterampilan yang lebih unggul biasanya lebih produktif dan lebih mudah terserap dalam pasar kerja. Becker berpendapat bahwa investasi dalam modal manusia memberikan berbagai keuntungan ekonomi, seperti peningkatan pendapatan, efisiensi kerja, dan peluang karier yang lebih luas. Dengan demikian, peningkatan IPM yang terdiri dari dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, berpengaruh positif dan dapat mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja karena memperkuat kemampuan produktif masyarakat dan memperluas akses mereka terhadap berbagai jenis pekerjaan. Temuan dari Maryati *et al.* (2021) berjudul “*Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Menuju Era Bonus Demografi di Sumatra Barat*” mengemukakan bahwa IPM berpengaruh positif serta signifikan pada penyerapan tenaga kerjanya, baik di tingkat sektoral maupun agregat. Ini memperlihatkan bahwa meningkatnya kualitas sumber daya manusia di Sumatra Barat sangatlah penting dalam memperluas kesempatan kerja dan memanfaatkan potensi bonus demografi secara optimal. Sebaliknya, studi Putri *et al.* (2022) berjudul “*Pengaruh PDRB, Upah Minimum Kota/Kabupaten, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016–2019*” menghasilkan temuan berbeda. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa IPM berpengaruh positif tetapi tidak signifikan pada penyerapan tenaga kerjanya, menandakan bahwa meningkatnya kualitas manusia belum sepenuhnya diikuti oleh perluasan kapasitas ekonomi untuk menampung tenaga kerja terampil. Dengan kata lain, meskipun kualitas SDM meningkat, ketersediaan lapangan kerja formal belum cukup untuk menyerapnya, terutama di wilayah dengan struktur ekonomi yang belum matang. Perbedaan hasil kedua penelitian ini memperlihatkan bahwa pengaruh IPM pada penyerapan tenaga kerja bergantung pada kondisi ekonomi serta struktur pasar kerja di setiap daerah. Di wilayah dengan ekonomi yang lebih maju dan sektor formal yang kuat, peningkatan IPM

biasanya diikuti oleh peningkatan lapangan kerja karena pasar tenaga kerja lebih mampu menampung pekerja berpendidikan. Namun, di daerah dengan dominasi sektor informal atau ekonomi tradisional, meningkatnya IPM belum tentu berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja karena adanya ketidaksesuaian antara kualifikasi tenaga kerja dan kebutuhan industri. Dengan demikian, penelitian ini mengacu pada teori *Human Capital* Becker (1964) untuk menganalisis sejauh mana peningkatan IPM sebagai bentuk investasi sumber daya manusia dapat berkontribusi pada peningkatan penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatra tahun 2020–2024. Merujuk uraian teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian ini, diantaranya:

- 1) H1: Diduga UMP memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatra tahun 2020–2024.
- 2) H2: Diduga PDRB memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatra tahun 2020–2024.
- 3) H3: Diduga IPM memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatra tahun 2020–2024.
- 4) H4: Diduga Tingkat Pengangguran memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatra tahun 2020–2024.
- 5) H5: Diduga UMP, PDRB, IPM, dan Tingkat Pengangguran secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatra tahun 2020–2024.

### 3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dimanfaatkan ialah deskriptif kuantitatif, karena data yang diteliti bersifat numerik untuk menguji hipotesis yang sudah ditentukan. Variabel dependent penelitian ini yaitu tenaga kerja yang bekerja, yang mewakili penyerapan tenaga kerja, dan variabel independennya yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP), Produk Domestik Regional Bruto pada Harga Konstan (PDRB ADHK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Pengangguran. Sumber sekunder untuk penelitian ini meliputi publikasi resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, Satu Data Indonesia, dan lembaga terkait lainnya. Analisis ini mencakup semua provinsi di Sumatra dari tahun 2020 hingga 2024. Metode analisisnya yaitu regresi data panel, yang mengombinasikan dimensi cross section (provinsi) dan time series (tahun). Teknik penentuan sampelnya dengan sampling jenuh, sehingga seluruh provinsi tersebut dijadikan sampel penelitiannya dan diperoleh 50 unit observasi (10 provinsi × 5 tahun). Dengan begitu, dihasilkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$PTK_{it} = \alpha + \beta_1 UMP_{it} + \beta_2 PDRB_{it} + \beta_3 IPM_{it} + \beta_4 PGG_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dengan Keterangan:

PTK	: Penyerapan Tenaga Kerja (jiwa)
UMP	: Upah Minimum Regional (juta rupiah)
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto (miliar rupiah)
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia (persen)
PGG	: Pengangguran (jiwa)
i	: Provinsi
t	: Tahun penelitian 2020 – 2024.
$\alpha$	: Konstanta.
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	: Koefisien regresi masing-masing variabel.
$\varepsilon$	: Error Term

Analisis ini melibatkan 4 tahapan: (1) Uji estimasi model regresi menggunakan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier untuk memilih model yang paling tepat diantara *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM); (2) Uji asumsi klasik yang terdiri dari uji



## RESEARCH ARTICLE

multikolinearitas untuk memastikan tidak terdapat hubungan yang terlalu tinggi diantar variabel independent dan uji heteroskedastisitas untuk menilai apakah varians residual bersifat homogen; (3) Uji hipotesis yang mencakup uji t untuk memastikan pengaruh tiap-tiap variabel independennya terhadap jumlah tenaga kerja secara parsial dan uji F untuk menilai pengaruh ketiganya secara simultan dengan signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ); dan (4) Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) untuk mengukur kapasitas model menjelaskan variansi variabel dependennya, dimana semakin besar nilainya memperlihatkan semakin baik variabel independen menjelaskan jumlah tenaga kerja. Dalam uji asumsi klasik data panel menurut Basuki dan Prawoto (2016) mengatakan bahwa uji autokorelasi tidak diperlukan karena data panel merupakan gabungan data *cross-section* dan *time series*, sedangkan autokorelasi hanya terjadi pada data *time series*. Tak hanya itu, uji normalitas dalam data panel tidak diperlukan karena bukan sesuatu yang harus dipenuhi.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Hasil

Tabel 1. Uji Estimasi Model Regresi

Test	Prob.	Keterangan
Uji Chow	0.0000	Fixed Effect Model (FEM)
Uji Hausman	0.0000	Fixed Effect Model (FEM)

Pada Tabel 1, hasil uji estimasi model regresi menunjukkan bahwa model yang paling sesuai untuk penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM), sehingga pengujian *Lagrange Multiplier* tidak diperlukan.

Tabel 2. Uji Multikolineritas

Variabel	UMP	PDRB	IPM	PGG
UMP	1.000000	-0.010623	0.362248	-0.241860
PDRB	-0.010623	1.000000	0.042264	0.762503
IPM	0.362248	0.042264	1.000000	-0.163684
PGG	-0.241860	0.762503	-0.163684	1.000000

Pada Tabel 2, hasil uji multikolineritas menggunakan metode *Pair Wise Correlation* menunjukkan bahwa nilai korelasi antar variabel UMP, PDRB, IPM, dan PGG semuanya berada di bawah 0,80. Korelasi tertinggi terdapat antara PDRB dan PGG, yaitu sebesar 0,7625, yang masih berada di bawah batas toleransi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak mengalami masalah multikolineritas.

Tabel 3. Uji Heterokedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
UMP	0.7459	Tidak Terjadi Gejala Heterokedastisitas
PDRB	0.4515	Tidak Terjadi Gejala Heterokedastisitas
IPM	0.8568	Tidak Terjadi Gejala Heterokedastisitas
PGG	0.1954	Tidak Terjadi Gejala Heterokedastisitas

Pada Tabel 3, hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glesjer menunjukkan nilai signifikansi untuk variabel UMP, PDRB, IPM, dan PGG masing-masing sebesar 0,7459, 0,4515, 0,8568, dan 0,1954. Karena semua nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

## RESEARCH ARTICLE

Tabel 4. Regresi Fixed Effect Model (FEM)

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	-6687218.	3231494	-2.069389	0.0457
UMP	-0.516378	0.247888	-2.083110	0.0444
PDRB	8.197084	1.481337	5.533570	0.0000
IPM	113371.4	54572.15	2.077458	0.0450
PGG	4.717629	1.387786	3.399393	0.0017

Setelah melakukan pengolahan dan analisis data dengan memanfaatkan alat analisis regresi data panel, hasil regresi berikut ini diperoleh:

$$Y = -6687217.70167 - 0.516377928022 \cdot X_1 + 8.19708434388 \cdot X_2 + 113371.354609 \cdot X_3 + 4.71762865272 \cdot X_4$$

- 1) Dari hasil analisis regresi diperoleh nilai konstanta sebanyak -6687218. Hal itu memperlihatkan bahwa apabila variabel independent UMP, PDRB, IPM, dan PGG bernilai nol, maka variabel dependen Penyerapan Tenaga Kerja bernilai negatif sebanyak -6687218 orang.
- 2) Variabel UMP memperoleh koefisien regresi sebanyak -0.516378 dengan arah negatif. Artinya, tiap peningkatan UMP 1% akan turunkan nilai Penyerapan Tenaga Kerja sebanyak -0.516378 orang.
- 3) Variabel PDRB memiliki koefisien regresi sebesar 8.197084 dengan arah positif. Artinya, setiap peningkatan PDRB 1% akan meningkatkan nilai Penyerapan Tenaga Kerja sebanyak 8.197084 orang.
- 4) Variabel IPM memiliki koefisien regresi sebesar 113371.4 dengan arah positif. Artinya, setiap peningkatan IPM 1% akan menaikkan nilai Penyerapan Tenaga Kerja sebanyak 113371.4 orang.
- 5) Variabel PGG memiliki koefisien regresi sebanyak 4.717629 dengan arah positif. Artinya, tiap peningkatan IPM 1% akan menaikkan nilai Penyerapan Tenaga Kerja sebanyak 4.717629 orang.

Tabel 5. Uji T-Statistik

Variabel	t-Statistic	Prob	Keterangan
UMP	-2.083110	0.0444	H0 ditolak dan H1 diterima
PDRB	5.533570	0.0000	H0 ditolak dan H2 diterima
IPM	2.077458	0.0450	H0 ditolak dan H3 diterima
PGG	3.399393	0.0017	H0 ditolak dan H4 diterima

- 1) Variabel UMP memiliki nilai *t-Statistic* sebanyak -2.083110 dengan nilai *Prob.* sebanyak 0.0444 (<0.05), sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Maka disimpulkan, bahwa UMP berpengaruh negatif signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.
- 2) Variabel PDRB memiliki nilai *t-Statistic* sebanyak 5.533570 dengan nilai *Prob.* sebanyak 0.0000 (<0.05), sehingga H0 ditolak dan H2 diterima. Maka disimpulkan bahwa PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.
- 3) Variabel IPM memiliki nilai *t-Statistic* sebanyak 2.077458 dengan nilai *Prob.* sebanyak 0.0450 (<0.05), sehingga H0 ditolak dan H3 diterima. Maka disimpulkan bahwa IPM berpengaruh positif signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.
- 4) Variabel PGG memiliki nilai *t-Statistic* sebanyak 3.399393 dengan nilai *Prob.* sebanyak 0.0017 (<0.05), sehingga H0 ditolak dan H4 diterima. Maka disimpulkan bahwa PGG berpengaruh positif signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.

Tabel 6. Uji F-Statistik

Alpha	F-Statistics	Prob (F.Statistics)
0.05	1924.674	0.000000

RESEARCH ARTICLE

Pada hasil uji simultan, nilai *F-statistic* diperoleh sebesar 1924,674 dengan nilai *Prob. (F-statistic)* sebesar 0,000000 ( $< 0,05$ ). Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa *Upah Minimum Provinsi*, *PDRB*, *IPM*, dan tingkat *Pengangguran* berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penyerapan tenaga kerja, sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_5$  diterima.

Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

R-Squared	Adj. R-Squared
0.998563	0.998044

Pada hasil uji *Koefisien Determinasi*, nilai *R-square* yang diperoleh adalah 0,998563. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel independen, yaitu *Upah Minimum Provinsi*, *PDRB*, *IPM*, dan tingkat *Pengangguran* terhadap variabel dependen, yaitu penyerapan tenaga kerja, secara simultan mencapai 99,8%, sementara sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Hal ini juga dapat dijelaskan oleh sifat homogenitas data ketenagakerjaan antarprovinsi di Indonesia, serta struktur ekonomi makro antarprovinsi yang relatif serupa, yang menguatkan hubungan antarvariabel tersebut.

#### 4.2 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Upah Minimum Provinsi* (UMP) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatra. Artinya, peningkatan UMP cenderung mengurangi penyerapan tenaga kerja, yang sejalan dengan temuan dari Utomo (2022) dan Budiasih & Asmara (2025). Kondisi ini mencerminkan karakteristik perekonomian Sumatra yang didominasi oleh sektor padat karya, seperti pertanian, perkebunan, dan pertambangan, di mana kenaikan biaya tenaga kerja menjadi faktor sensitif. Kenaikan UMP yang tidak diiringi dengan peningkatan produktivitas sering kali memaksa perusahaan untuk menekan biaya operasional, seperti dengan mengurangi jumlah pekerja atau menggantinya dengan otomatisasi. Akibatnya, meskipun kebijakan UMP bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja, dampak tidak langsungnya justru dapat menghambat penyerapan tenaga kerja di sektor padat karya. Secara teoritis, hal ini konsisten dengan teori Keynesian yang menyatakan bahwa kenaikan upah tanpa peningkatan produktivitas dan permintaan agregat akan menyebabkan pengurangan produksi dan penyerapan tenaga kerja. Sebaliknya, jika kenaikan upah diiringi dengan peningkatan konsumsi dan investasi, pengusaha akan lebih cenderung meningkatkan produksi dan tenaga kerja. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Semakin tinggi PDRB suatu daerah, semakin banyak lapangan kerja yang tercipta, terutama di sektor manufaktur, perdagangan, dan jasa.

Hal ini sesuai dengan temuan dari Maryati *et al.* (2021) dan Chomariah & Sri S (2023), yang menegaskan bahwa kemajuan perekonomian, yang tercermin dalam peningkatan PDRB, sangat berperan dalam menciptakan peluang kerja dan mengurangi pengangguran. Secara teoritis, peningkatan PDRB memicu peningkatan permintaan agregat, yang pada gilirannya mendorong pengusaha untuk meningkatkan produksi dan menambah tenaga kerja. Oleh karena itu, penguatan sektor produktif dan padat karya di Pulau Sumatra menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. *Indeks Pembangunan Manusia* (IPM) juga ditemukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Wilayah dengan IPM tinggi, yang menunjukkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, lebih mampu menciptakan lapangan kerja karena memiliki tenaga kerja yang lebih terdidik dan sehat. Peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan akan memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan daya saing tenaga kerja. Temuan ini sejalan dengan penelitian Maryati *et al.* (2021) dan Utomo (2022), yang mengungkapkan bahwa peningkatan IPM secara signifikan berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. Secara teoritis, hal ini konsisten dengan Teori Modal Manusia (Human Capital Theory) yang menekankan bahwa investasi dalam pendidikan dan kesehatan akan meningkatkan kualitas tenaga kerja, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Terakhir, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Meskipun hal ini mungkin terdengar bertentangan, temuan ini dapat

## RESEARCH ARTICLE

dijelaskan oleh karakteristik ekonomi Sumatra yang masih didominasi oleh sektor padat karya dan informal, seperti pertanian, perdagangan, dan usaha kecil. Masyarakat yang menganggur cenderung menciptakan aktivitas ekonomi mandiri atau bekerja di sektor informal meskipun pendapatannya rendah. Kenaikan tingkat pengangguran dapat memicu munculnya lapangan kerja baru di sektor informal, yang dapat memperluas penyerapan tenaga kerja. Temuan ini sejalan dengan penelitian Putriy & Nurhayati (2024) dan Andhika *et al.* (2025), yang mengindikasikan bahwa peningkatan tingkat pengangguran berhubungan dengan peningkatan kesempatan kerja, terutama di sektor informal. Secara teoritis, hal ini dapat dijelaskan melalui teori Keynesian yang menyatakan bahwa peningkatan belanja publik, investasi, dan konsumsi dapat mendorong perekonomian dan menciptakan lapangan kerja baru. Oleh karena itu, untuk memastikan penyerapan tenaga kerja tetap berkelanjutan, pemerintah daerah perlu menyeimbangkan penciptaan lapangan kerja dengan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui kebijakan investasi, pelatihan keterampilan, serta pemberdayaan sektor informal dan UMKM.

## 5. Kesimpulan

Penelitian mengenai dinamika ketenagakerjaan di Pulau Sumatra selama periode 2020–2024 menghasilkan beberapa temuan penting. Hasil analisis menunjukkan bahwa *Upah Minimum Provinsi* (UMP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Peningkatan UMP cenderung memaksa perusahaan untuk menekan biaya operasional, baik dengan mengurangi jumlah pekerja atau beralih ke otomatisasi, terutama di sektor padat karya yang sangat sensitif terhadap perubahan biaya tenaga kerja. Sebaliknya, *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, yang mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan berdampak pada peningkatan produksi dan membuka lebih banyak peluang kerja di berbagai sektor. *Indeks Pembangunan Manusia* (IPM) juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, yang menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui sektor kesehatan, pendidikan, dan keterampilan, mampu mendorong penyerapan tenaga kerja yang lebih besar. Sementara itu, tingkat pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, yang menunjukkan bahwa struktur ekonomi Sumatra yang didominasi sektor informal memungkinkan sebagian penganggur beralih ke pekerjaan informal atau mendirikan usaha mandiri, mengingat pasar kerja sektor formal yang belum optimal. Secara keseluruhan, penelitian ini memperkaya pemahaman empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pasar kerja di Sumatra. Implikasi kebijakannya menekankan pentingnya penetapan upah minimum yang sesuai dengan produktivitas daerah, pengembangan industrialisasi di sektor padat karya, serta peningkatan investasi dalam bidang pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Selain itu, penguatan sektor usaha mikro dan informal perlu menjadi perhatian untuk memastikan bahwa peningkatan penyerapan tenaga kerja dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di daerah tersebut. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mempertimbangkan variabel tambahan, seperti investasi, inflasi, dan jumlah industri, serta memperluas cakupan wilayah dan rentang tahun analisis untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dinamika ketenagakerjaan di Indonesia.

## 6. Referensi

- Aji, A. C., & Ariani, M. B. N. (2024). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di 10 provinsi Pulau Sumatera tahun 2010-2022. *Jurnal Of Development Economic and Digitalization*, 3(2), 1–20.
- Andhika, G. A., Husna, I. S., Utami, J. M. P., & Diniati, B. T. (2025). Pengaruh PDRB, upah minimum, pengangguran, dan jumlah penduduk terhadap tenaga kerja di Jawa Timur. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 6(2), 287–305.
- Azam, A., Rafiq, M., Shafique, M., & Yuan, J. (2023). Employment, fossil fuel energy, and human development index: A panel data investigation. *Energies*, 16, 1–18.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2016). *Analisis regresi dalam penelitian ekonomi & bisnis: Dilengkapi aplikasi SPSS & EVIEWS*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Becker, G. S. (1993). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education*. University of Chicago Press.
- Budiasih, J. D., & Asmara, K. (2024). Pengaruh pendidikan, UMK, dan PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten tahun 2012-2021. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 10(2), 826–836.
- Chomariah, W. I., & Sri S, R. I. (2023). Analisis faktor-faktor penyerapan tenaga kerja sektor industri besar dan sedang. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(4), 1170–1181.
- Dixon, R. (2024). Unemployment entry, exit, and Okun's law: An analysis with Australian data. *Australian Journal of Labour Economics*, 27(1), 161–181.
- Haider, A., Jabeen, S., Rankaduwa, W., & Shaheen, F. (2023). The nexus between employment and economic growth: A cross-country analysis. *Sustainability*, 15, 1–18.
- Indradewa, I. G. A., & Natha, K. S. (2015). Pengaruh inflasi, PDRB, dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. *E- $\gamma$ -Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(8), 923–950.
- Irfan, R. M., & Faridatussalam, S. R. (2023). Determinan penyerapan tenaga kerja di Karesidenan Pati tahun 2017-2021. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 1413–1418. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.847>.
- Kartikawati, D., Darsono, & Sundari, M. T. (2019). The role of agriculture, forestry, and fishery sector in the development of Malinau District (location quotient and shift share approach). *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*, 314, 012077. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/314/1/012077>.
- Keynes, J. M. (1936). *The general theory of employment, interest, and money*. BN Publishing.
- Maryati, S., Handra, H., & Muslim, I. (2021). Penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi menuju era bonus demografi di Sumatra Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 21(1). <https://doi.org/10.21002/jepi.2021.07>.



## RESEARCH ARTICLE

- Pangastuti, Y. (2015). Analysis of factors affecting labor absorption in Central Java. *Journal of Economic Development Analysis*, 4(2), 203–211.
- Paun, C. V., Nechita, R., Patruti, A., & Topan, M. V. (2021). The impact of the minimum wage on employment: An EU panel data analysis. *Sustainability*, 13, 1–17.
- Prayogo, I., & Hasmarini, M. I. (2022). Analisis pengaruh IPM, upah minimum, PDRB, dan jumlah penduduk terhadap penyerapan tenaga kerja di Yogyakarta tahun 2018-2021. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 5(2), 77–85. <https://doi.org/10.37531/sejaman.vxix.3455>.
- Putri, E., Setyowati, E., & Rosyadi, I. (2022). Pengaruh produk domestik bruto (PDRB), upah minimum kota/kabupaten (UMK), dan indeks perkembangan manusia (IPM) terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2019. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 651–655. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.594>.
- Putriy, R. M., & Nurhayati, S. F. (2024). Analisis faktor-faktor penyerapan tenaga kerja di Karesidenan Pekalongan tahun 2017-2022. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 4(2), 173–183.
- Saputri, I., & Boedi, A. (2018). Analisis sektor ekonomi unggulan pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(2), 217–229.
- Susilowati, L., & Wahyuni, D. (2019). Pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja bidang industri di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 15(2), 222–230.
- Todaro, M. P. (2011). *Pembangunan ekonomi*. Erlangga.
- Utomo, C. P. (2022). The factors of affecting labor absorption in Java Island. *EFFICIENT: Indonesian Journal of Development Economics*, 5(1), 1444–1452.
- Wasilaputri, F. (2016). The influence of provincial minimum wage, GRDP, and investment on labor absorption in Java Island in 2010-2014. *Journal of Education and Economics*, 5(3), 243–250.